

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota dari organisasi Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), Afrika Selatan atau yang lebih dikenal sebagai BRICS melalui pengumuman yang disiarkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil (Arif, 2025). Peristiwa ini menjadi sebuah kejutan besar dalam pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebelumnya Indonesia dikabarkan hanya akan menjadi anggota mitra dari organisasi tersebut seperti yang diutarakan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada tahun 2024. Meskipun berita tersebut terkesan mengejutkan, pada kenyataannya Indonesia telah mengirim sinyal ketertarikan untuk ikut ke dalam organisasi tersebut semenjak era kepemimpinan Joko Widodo. Ketertarikan ini semakin kuat ketika Indonesia pada tahun 2021 terkena kebijakan larangan impor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Uni Eropa dan pada tahun berikutnya kalah dalam gugatan larangan ekspor biji nikel di persidangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam sudut pandang Presiden Joko Widodo BRICS dianggap sebagai organisasi yang bisa menjadi pemersatu negara-negara *Global South* melawan tindakan diskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara *Global North* (Arif, 2025).

Anggapan dari Presiden Joko Widodo terkait BRICS sebagai organisasi pemersatu negara-negara *South* juga sebelumnya dipahami dengan baik oleh

beberapa peneliti. Andre C. Jordaan (2021) mengatakan bahwa BRICS merupakan kendaraan paling potensial dalam mewujudkan keinginan dari kerja sama negara-negara *South* atau yang lebih dikenal sebagai *South-South Cooperation*, dikarenakan adanya kepercayaan bahwa perkembangan atau pembangunan hanya akan diraih oleh yang “miskin” melalui dirinya sendiri dengan kerja sama bersama negara-negara yang serupa. Bahkan dengan semakin bertambahnya anggota dari BRICS, ada kemungkinan perubahan nama yang akan dilakukan dengan menambahkan simbol “+” menjadi BRICS+ yang menurut Perdana Menteri Tiongkok Wang Yi (dalam Lissovovlik & Vinokurov, 2019) mengatakan bahwa nantinya BRICS+ akan menjadi *platform* yang merepresentasikan kerja sama negara *South-South* melalui dialog dengan berbagai negara berkembang untuk membangun kemitraan yang lebih luas.

BRICS merupakan sebuah akronim dari lima negara yang bisa dikatakan sebagai pendiri awal dari organisasi tersebut, yaitu Brasil; Rusia; Tiongkok (China); India; Afrika Selatan (F. M. Putri & Santoso, 2023). Terminologi awal dari BRICS, yaitu BRIC, adalah buatan dari Jim O’neill seorang kepala ekonom dari Goldman Sachs sebuah bank investasi multinasional pada tahun 2001 yang didasari dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh keempat negara pendiri awal yaitu Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Optimisme dari sisi ekonomi inilah yang membuat terminologi BRIC akhirnya diberikan sebagai sebuah cita-cita masa depan bagi keempat negara tersebut. Terlepas dari keberagaman latar belakang yang dimiliki masing-masing negara pendiri, BRICS telah membentuk aliansi yang kuat berdasarkan kepentingan bersama dalam menangani permasalahan global dan

memperkuat posisi mereka dalam tatanan dunia yang terus berkembang (F. M. Putri & Santoso, 2023). Hasil dari pertemuan rutin anggota BRICS bisa dilihat dari dibuatnya lembaga keuangan dan perjanjian berupa *New Development Bank* (NDB) dan *The Contingent Reserver Arrangement* (Li, 2019). Menurut Li (2019) Prinsip dari organisasi BRICS didasari dalam 5 poin yaitu: kesetaraan antar negara, mempromosikan multipolaritas, demokrasi, pengambilan keputusan bersama, dan supremasi hukum dalam hubungan internasional. Stefan A. Schrim (2023) juga mengatakan bahwa BRICS mendukung konsep alternatif untuk tatanan dunia yang baru dengan berdasarkan tiga poin utama yaitu: multipolaritas, kedaulatan nasional, dan menentang keberlanjutan dominasi barat dalam nilai-nilai serta kepentingannya.

BRICS meski sering diafiliasi sebagai sebuah organisasi internasional yang berfokus kepada ekonomi, tetapi kenyataannya mereka juga sering membahas terkait politik, hukum internasional dan masalah sosial maupun kemanusiaan. Bahkan isu pertahanan juga memiliki agendanya tersendiri dalam organisasi BRICS. Meskipun kemungkinan perubahan organisasi menjadi sebuah aliansi adalah mungkin menurut Zen Han dan Mihaela Papa (2022) tetapi kenyataannya konsep keamanan (*security*) dalam organisasi BRICS itu berbeda dengan konsep yang dipakai dalam organisasi lain. Brasil menjadi pelopor dalam isu keamanan organisasi dengan memperkenalkan ‘*development-security alliance*’ yang berfokus terhadap dua hal yaitu: *rising power engage informally around mutual interest on developmental primally economic and global governance issues; build trust and gradually expand their cooperation to encompass security issues* (Han & Papa,

2022). Selain konsep tersebut, BRICS juga memiliki strategi keamanan yang berfokus kepada *Counter-Terrorism Strategy*.

Menurut Arapova dan Lissovlik (2021) BRICS berdiri untuk mereformasi keberadaan institusi global, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa dan sistem dari institusi finansial internasional, serta mengekspresikan dukungan untuk re-distribusi kekuasaan demi kepentingan mereka. Bisa dikatakan BRICS tengah berusaha untuk membuat sebuah poros bagi negara-negara berpredikat *Global South*. Seperti yang dikatakan peneliti di atas bahwa “*BRICS Bloc*” selalu memposisikan diri mereka sebagai alat untuk mempromosikan kepentingan dari negara berkembang di level institusi global. Fenomena reformasi yang disuarakan oleh BRICS pada dasarnya menurut Jyrki Käkönen (2019) merupakan bentuk awal dari perubahan yang terjadi dalam sistem internasional yang awalnya berfokus kepada *East-West* menjadi *North-South*. Istilah “*BRICS Bloc*” yang berfokus pada re-distribusi kekuasaan dilatarbelakangi oleh penindasan kolonialisasi yang dialami oleh negara-negara *Global South*. Menurut Archaya dan Buzan (dalam Käkönen, 2019) isu kesetaraan dan perlawanan terhadap dominasi barat akan menjadi orientasi utama dari kerja sama negara-negara *Global South*. Nantinya ini menjadi isu utama pemersatu dalam organisasi BRICS dikarenakan keberagaman dalam organisasi tersebut memunculkan berbagai perbedaan keputusan masing-masing anggota namun dalam isu kesetaraan dan perlawanan terhadap dominasi barat (*North-South relations*) akan selalu ada konsensus kepentingan yang tercapai.

Selain itu, menurut Maria L. Lagutina (2019) dikatakan bahwa salah satu tujuan utama BRICS adalah untuk mempromosikan perpindahan paradigma

dominasi barat dalam sistem pemerintahan dunia menjadi lebih inklusif dengan memakai paradigma *polycentric nature* yang dimana negara-negara berkembang bisa memainkan peranan penting bersama negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan organisasi BRICS pada tahun 2017 di Tiongkok dengan diadopsinya *Xiamen Declaration* yang salah satu poinnya adalah dikatakan bahwa perlu adanya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB dengan Brasil, India, dan Afrika Selatan diberikan status anggota tetap dalam dewan keamanan dengan kemungkinan memiliki hak veto (*point 40*).

Meskipun begitu, penting untuk mengkaji BRICS dari segala sudut pandang. Faktanya, dalam internal organisasi BRICS tidak seharmonis seperti prinsip yang mereka coba bangun. Adanya konflik yang dimiliki oleh masing-masing anggota (seperti Tiongkok dan India) serta kepentingan nasional (*National Interest*) yang sangat beragam dan tidak diperbolehkannya saling intervensi masalah internal masing-masing anggota membuat BRICS sangatlah beragam dalam artian positif maupun negatif. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan dalam realitas global yang baru memaksa sebuah negara dan aliansi untuk mencari sebuah bentuk dan instrumen baru untuk mencapai tujuan strategis (Arapova & Lissovnik, 2021). Sebagai penegas, Li (2019) mengatakan bahwa ada keraguan dan skeptisme dalam efektivitas dan keberlanjutan dari BRICS yang didasari oleh kurangnya atau rendahnya tingkat kelembagaan organisasi tersebut.

Adanya keraguan terhadap efektivitas organisasi BRICS yang dikatakan oleh Li mendapatkan persetujuan seperti dari Marko Juutinen (2019) yang menyebutkan adanya istilah *BRICS paradox*. Hal ini disebabkan banyaknya

perbedaan, pertentangan, interpretasi dan ekspektasi terhadap organisasi BRICS yang terlihat tidak sesuai dengan realitas yang ada. Juutinen (2019) mengatakan bahwa dengan tidak adanya entitas tunggal yang kuat dalam organisasi serta tidak jelasnya struktur hierarki yang ada akan menjadikan organisasi tersebut tidak efektif sebagaimana yang diyakini kaum klasik realis dalam teori *Europian Integration*. Kesetaraan yang diangkat oleh BRICS serta kedaulatan yang diutamakan membuat masing-masing anggota dalam organisasi memiliki posisi yang sama dan tidak adanya satu entitas yang lebih tinggi. Dalam pemahaman kaum realis, hal ini tidaklah baik dikarenakan akan mengganggu efektivitas organisasi dengan tidak adanya negara yang bisa menjadi titik utama pengambil keputusan yang nantinya akan memperlambat konsensus untuk pengambilan keputusan. Maka beberapa peneliti menganggap bahwa BRICS tidak akan efektif dalam pelaksanannya dengan multipolaritas yang dijunjung tinggi dan menyebabkan adanya istilah *BRICS paradox*. (Juutinen, 2019)

Indonesia sebagai anggota baru BRICS pada tahun 2025 perlu bersikap bijak dan pintar dalam menghadapi persoalan internal dan eksternal dari organisasi tersebut. Kepentingan nasional Indonesia yang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif perlu diperjuangkan dikarenakan salah satu dari empat alasan sebuah negara ikut bergabung ke dalam Organisasi Antar-Pemerintah adalah pengaruh politik (Bakry, 2017). Selain itu dibentuknya sebuah organisasi internasional juga pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing anggota (Wilkinson, 2007). Kesempatan dalam diterimanya Indonesia sebagai anggota BRICS, perlu dimanfaatkan dengan baik untuk membantu permasalahan

internal maupun eksternal negara. Kebutuhan internal yang bersifat ekonomi melalui kebutuhan dana investasi dalam berbagai proyek pemerintahan baru era Presiden Prabowo Subianto yang pastinya memerlukan dana sangat besar agar setiap program kerja tersebut berjalan dengan lancar, serta kesempatan agar memiliki pengaruh politik di dunia internasional bisa dikatakan menjadi dua faktor dasar yang dijadikan pijakan kepentingan nasional Indonesia dalam keputusan bergabung dengan BRICS.

Namun tidak semua orang setuju dengan keputusan itu, ada beberapa ahli yang menganggap bahwa keputusan itu bisa berbahaya dan bahkan melanggar konstitusi politik bebas aktif itu sendiri. Seperti Kurniawan dkk. (2023) menyatakan bahwa Indonesia berpihak kepada kubu penentang kekuatan-kekuatan besar dengan keputusan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Selain itu, dalam segi politik ada ancaman nyata yang mengintai ketika Indonesia masuk ke dalam BRICS, seperti diketahui bahwa pemimpin utama dalam organisasi adalah Tiongkok serta Rusia yang sudah diketahui bahwa mereka memiliki masalah konfrontasi langsung maupun tidak langsung dengan Amerika Serikat pada beberapa tahun terakhir ini. Lalu dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru, bisa menjadikan ini sebagai sinyal bahaya dikarenakan kebijakan konfrontatif Trump terhadap Tiongkok dan Rusia bisa menjadikan BRICS pada akhirnya menjadi sebuah Blok Anti-Barat (Li, 2019).

Kemungkinan adanya pemaknaan “Anti-Barat” untuk organisasi BRICS dijelaskan oleh Schrim (2023) bahwa adanya *Southern World Order* (WSO) yang menjadi lawan dari *Liberal International Order* (LIO) yang dipakai oleh negara

barat setelah Perang Dunia kedua. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, yang dimana anggota-anggota BRICS semuanya (kecuali Brasil) tidak mengecam tindakan Rusia dan memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi PBB serta mengecam tindakan dunia barat terhadap pemberian sanksi kepada Rusia. Hal ini menandakan bahwa BRICS setidaknya dalam sudut pandang *Global North* itu merupakan organisasi yang memang menentang tatanan dunia yang dijalankan oleh negara Barat.

Dalam aspek ekonomi, BRICS sendiri meski memiliki prospek ekonomi menjanjikan seperti kontribusi sebesar 24,07% dari produk domestic bruto (GDP) global pada tahun 2019, serta penyumbang investasi asing sebesar 12,96% pada tahun 2019 (Levianto et al., 2024). Bahkan menurut Fajarlie (dalam Elia & Marselina, 2023) dari data Bank Dunia pada tahun 2019 dengan populasi sekitar 41% dari penduduk dunia merupakan perwakilan dari negara-negara BRICS dan mereka memiliki 16% saham perdagangan dunia. Tetapi dalam perdagangan intra-BRICS dari data *International Monetary Fund* tahun 2022 dikatakan hanya berkisar 15% dari total perdagangan masing-masing anggota. Selain itu, *New Development Bank* sebagai alternatif bank dunia yang diusung oleh BRICS ternyata baru bisa menyalurkan dana sebesar US\$30 miliar semenjak didirikan pada tahun 2014, jumlah ini sangatlah kecil bahkan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, karena dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan pemerintah Indonesia berkisar US\$500 miliar hingga tahun 2023 (Rizky, 2025).

Dalam isu politik, BRICS dengan mengutamakan kedaulatan dan kesetaraan, menyebabkan kepentingan nasional dari masing-masing anggotanya

terlihat dengan jelas *diversity*-nya, bahkan bisa dikatakan BRICS dipakai sebagai alat pemenuhan dari kepentingan masing-masing anggota. Menurut Varela dan Delgado (2019) masing-masing dari anggota BRICS memiliki kepentingannya sendiri dalam keanggotaan organisasi. Seperti Tiongkok melalui BRICS dibuat *New Development Bank* sebagai cara untuk menghindari tantangan yang bisa saja dihadapi dalam pengambilan keputusan terhadap sistem keuangan internasional. Sedangkan Rusia menggunakan BRICS sebagai cara untuk menghindari pengucilan oleh dunia internasional atas beberapa kebijakannya seperti invasi terhadap Ukraina, permasalahan Georgia dan dukungannya terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah. BRICS juga menjadi alternatif untuk mendapatkan pendapatan finansial untuk infrastruktur di beberapa wilayah terluar Rusia yang dekat dengan Asia. BRICS juga menjadi jalan bagi Rusia untuk memberikan pasokan energi kepada dua negara langganannya seperti Tiongkok dan India serta untuk meminimalisir dampak sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa. BRICS juga dijadikan platform oleh Afrika Selatan sebagai pemenuhan terhadap kepentingan politik luar negerinya yang “netral” terhadap permasalahan invasi Rusia terhadap Ukraina dalam pertemuan organisasi pada tahun 2023 di Johannesburg (Westhuizen, 2024).

Bahkan Brasil menggunakan BRICS sebagai modal untuk mendapatkan posisi dalam dunia internasional melalui pemberitaan media massa dalam negeri *The Rio Times*, Iran sebagai anggota baru BRICS juga memanfaatkan BRICS sebagai cara untuk menetralisir efek negatif yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui sanksi ekonomi, serta mencari posisi baru dalam tatanan global

sebagaimana yang diberitakan oleh media massa dalam negeri *Tehran Times* (Abdeldayem & Kswat, 2025).

Aspek Politik perlu dikaji secara khusus dalam melihat fenomena bergabungnya Indonesia dengan BRICS, dikarenakan dalam sebuah kepentingan nasional tidak serta merta hanya berfokus ke dalam masalah ekonomi, bahkan organisasi BRICS sendiri tidak bisa dikatakan sepenuhnya merupakan organisasi yang berfokus terhadap ekonomi. Dalam konsep kepentingan nasional, yang dijadikan aspek landasannya bisa berupa banyak hal dan aspek politik, ideologi, serta keamanan nasional bisa menjadi penentu dari keberadaan kepentingan nasional selain dari kebutuhan ekonomi. Selain itu, kepentingan nasional tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya sebuah kebijakan yang dibuat untuk merealisasikan kepentingan tersebut, maka dari itu teori sensitivitas risiko akan digunakan untuk melihat proses keputusan dari pembuatan kebijakan untuk memenuhi atau memperjuangkan kepentingan nasional. Patrick Morgan (dalam Pratiwi, 2017) mengatakan ada lima level analisis yang bisa dipakai untuk memahami perilaku aktor dalam hubungan internasional, yaitu: level analisis individu; level analisis kelompok individu; level analisis negara-bangsa; level analisis kelompok negara-bangsa; level analisis sistem internasional. Penggunaan level analisis negara-bangsa akan menjawab dari proses keputusan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya ketika resmi bergabung dengan BRICS.

Penelitian yang membahas terkait BRICS cenderung lebih memfokuskan terhadap aspek ekonomi dan melepaskan aspek politik seperti Rahmatulummah dkk. (2025) menjelaskan bahwa masuknya Indonesia dalam BRICS maupun OECD

dinilai dapat memberikan posisi yang strategis bagi Indonesia dalam ekonomi dan politik global. Namun aspek politik tidak dijabarkan secara jelas dan terfokus hanya kepada aspek ekonominya saja. Dalam penelitian ini ada kemungkinan terbaik yang akan Indonesia dapatkan dari kedua organisasi tersebut, seperti dengan OECD nantinya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk melihat dan belajar bagaimana sistem dan standar terbaik dari kebijakan ekonomi internasional yang nantinya akan memperbaiki kebijakan publik serta reputasi dari ekonomi Indonesia. Lalu untuk BRICS, keuntungan yang didapatkan adalah peluang dalam kegiatan ekspor serta kerja sama bagi negara-negara berkembang. Penelitian ini tidak secara jelas menjelaskan aspek politik yang dihadapi maupun dicoba dalam keanggotaan Indonesia di kedua organisasi tersebut, khususnya BRICS, padahal organisasi tersebut juga memiliki agenda tersendiri untuk politik. Dengan diisi oleh negara yang mencerminkan *Global South* serta sebagai negara-negara berkembang, BRICS bisa menjadi tonggak baru dalam mengguncangkan hegemoni *Global North* dalam tatanan dunia, dan organisasi ini mencoba untuk menjadi representatif dari negara-negara dunia ketiga untuk mereformasi sistem internasional. Kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia dalam keputusan bergabung dengan BRICS tidak murni berdasarkan masalah ekonomi, tetapi ada unsur politik juga yang ingin diperjuangkan di sana.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan Iskandar dkk. (2022) yang mencoba untuk mempelajari bagaimana Indonesia mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam usaha Tiongkok memengaruhi kebijakan melalui investasi yang diberikan. Hasil dari penelitian ini adalah proses yang harus diterima dan

diperjuangkan melalui kepentingan nasional dalam politik internasional tidak selalu berjalan sesuai rencana meski ada keselarasan melalui visi dan misi, adanya usaha untuk memengaruhi kepentingan nasional Indonesia oleh Tiongkok serta keteguhan yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo dalam pemenuhan kepentingan nasional dalam kancah politik internasional membuat kita tahu bahwa dalam prosesnya meski harus ada penyesuaian di akhir, prinsip dasar dari kepentingan nasional harus tetap dijaga dan diperjuangkan dalam kerja sama internasional demi tercapainya kepentingan negara sendiri. Menariknya dalam penelitian ini, kepentingan nasional yang merupakan kepentingan ekonomi tetapi dalam prosesnya aspek politiklah yang menentukan apakah kepentingan itu bisa tetap eksis atau gagal, ini menjadi sebuah tanda bahwa dalam kancah politik internasional, untuk memperjuangkan sebuah kepentingan nasional harus dilihat dari berbagai aspek khususnya politik yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kepentingan nasional itu dilaksanakan.

Lalu penelitian yang dilakukan Braviano dan Heriantomo (2024) berfokus kepada sistem peminjaman dana yang diberikan oleh *New Development Bank* (NDB) untuk negara peminjam yang dibandingkan dengan sistem yang diberikan oleh *International Monetary Fund* (IMF), bahwa sistem NDB lebih disukai oleh negara-negara berkembang dikarenakan proses pengembalian dana yang terkesan lebih mudah ketimbang IMF dan dalam proses penggunaan dana tersebut pihak pemberi (NDB) cenderung tidak mencampuri urusan internal dari negara peminjam. Penelitian ini memberikan sebuah landasan dalam ketermungkinan kepentingan nasional yang bisa diwujudkan oleh Indonesia dan memang disebutkan

bahwa prospek NDB ini bisa memengaruhi stabilitas politik regional. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait pengaruh yang diberikan terhadap aspek politiknya dan malah cenderung fokus kepada sistem peminjaman dana yang diberikan oleh NDB.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qobidl 'Ainul Arif (2025) menjelaskan alasan dan pengaruh politik yang mungkin akan dihadapi Indonesia Ketika bergabung secara resmi jadi anggota BRICS. Menurut peneliti tersebut, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah dikarenakan kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo yang berlandaskan prinsip bertetangga yang baik (*good neighbor policy*) dengan *tagline* "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak". Selain itu ditambah dengan polemik ketika masa Presiden Joko Widodo yang bersangkutan dengan sanksi dan larangan ekspor, serta pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait lemahnya pengaruh politik negara-negara *Global South* dan negara-negara muslim dalam kancah politik internasional terkhusus dalam menghadapi kekuatan imperialis, maka perlu adanya persatuan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Namun hal ini tidaklah mudah dikarenakan ada ketakutan akan sanksi yang mengintai dari Barat terkait organisasi yang diisi oleh negara bermasalah seperti Rusia dan Tiongkok membuat Indonesia harus belajar untuk *survive* meskipun menurut Duta Besar AS untuk Indonesia, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat dipahami oleh pemerintah AS dikarenakan latar dari politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Hanya saja, dalam penelitian ini meski aspek politik dibahas tetapi itu hanya sekadar latar belakang semata tanpa mencoba menjelaskan lebih lanjut

terkait kepentingan nasional yang dicoba disalurkan oleh Indonesia melalui BRICS, alasan dan resiko menjadi hal yang diutamakan dalam penelitian ini tanpa dicoba dianalisis lebih dalam untuk melihat permainan politik Indonesia yang tentunya didasari oleh kepentingan nasional negara Indonesia.

Terakhir ada penelitian dari Kurniawan dkk. (2023) Dalam penelitian ini berfokus kepada prinsip politik bebas aktif Indonesia ketika bergabung dengan BRICS. Menurut penelitian ini bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan pelanggaran terhadap prinsip bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini disebabkan makna dari politik bebas aktif menurut peneliti adalah bebas dalam menentukan pilihan terkait suatu isu atau permasalahan, dan ketika Indonesia bergabung dengan BRICS itu berarti Indonesia telah berpihak kepada suatu kubu/poros kekuatan baru. Selain itu, dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa kepentingan nasional tidaklah tepat apabila dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan prinsip kebijakan politik luar negeri dikarenakan sifat dari kepentingan nasional yang subjektif serta bentukan dari segelintir orang ketimbang keseluruhan dari masyarakat.

Pada penelitian di atas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS semata-mata hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi. Padahal dalam makna kepentingan nasional jelas lebih dari sekadar permasalahan ekonomi semata. Dengan menggunakan level analisis Morgan terkait negara-bangsa, perlu adanya kajian terkait proses pembuatan keputusan untuk melihat pembentukan dari kepentingan nasional serta untuk mengetahui bahwa dalam kepentingan nasional tersebut ada aspek politik yang juga diperjuangkan selain aspek ekonominya. Maka

dari itu, peneliti ingin mengkaji mengenai aspek politik dalam kepentingan nasional Indonesia yang berusaha diwujudkan melalui keanggotaan BRICS. Karena aspek politik merupakan sebuah tenaga dan kunci bagi sebuah kepentingan nasional agar bisa terlaksanakan dalam kancah perpolitikan internasional.

Kemudian peneliti juga ingin mengkaji terkait keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dilihat dari prinsip politik bebas aktif dikarenakan adanya dua perspektif berbeda yang menyatakan bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip politik bebas aktif yang tertera dalam Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu selain mengenai fokus penelitian yang berfokus terhadap aspek politiknya, penelitian ini tidak menitikberatkan kepada keuntungan maupun kerugian yang akan didapat oleh negara Indonesia. Melainkan akan memaparkan apa saja kepentingan nasional Indonesia yang akan diperjuangkan dalam organisasi BRICS serta bagaimana keputusan untuk bergabung diambil oleh negara Indonesia. Dengan menggunakan beberapa konsep pendukung seperti konstruktivisme, politik luar negeri, serta teori sensitivitas risiko diharapkan akan membantu menganalisis dan menemukan apa saja kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan oleh negara Indonesia. Dengan begitu, judul penelitian ini akan berupa “Analisis Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Keputusan Bergabung Dengan BRICS”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka akan muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Apa saja kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan dalam organisasi BRICS?
- 2) Bagaimana keputusan Indonesia bergabung BRICS menggunakan perspektif negara-bangsa atas kepentingan nasional dalam aspek politik?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa saja kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan dalam organisasi BRICS.
- 2) Untuk mengetahui keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS menggunakan perspektif negara bangsa atas kepentingan nasional dalam aspek politik.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu bagi pembaca yang nantinya akan dibagi ke dalam dua jenis kegunaan, antara lain:

### **1.3.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan mengenai materi kepentingan nasional, politik internasional, serta organisasi internasional dalam kerangka fenomena Indonesia dengan BRICS. Peneliti juga berharap jikalau penelitian ini bisa dijadikan sebagai data sukender maupun tersier bagi para peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama terkait fenomena bergabungnya Indonesia dalam organisasi BRICS.

### **1.3.2 Aspek Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan salah satu masukan bagi permasalahan politik internasional terkait dinamika yang akan dihadapi Indonesia dalam organisasi BRICS. Dengan realitas politik internasional yang rumit, Indonesia harus bisa beradaptasi dan tidak terbawa arus oleh sebuah organisasi yang seharusnya menjadi tempat Indonesia membuat arusnya sendiri. Lalu, peneliti ingin penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahan yang sama, baik dalam lingkup dasarnya yakni politik internasional, maupun dalam lingkup khususnya seperti kasus Indonesia dengan BRICS.